

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010),
hlm.35.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Bandung,
PT. Refika Aditama, hlm 84.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.,
hlm. 29.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 87.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm.5.
- Maya Indah, *Perlindungan korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.
- Yentriyani Andy, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta,
hlm.12.
- Moeljatno, dikutip dalam Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 82

Hj. Rodiyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Panduan Permohonan Restitusi*, 2024

C. Jurnal

Adewole, Mary Abiodun. 2025. "Women in Human Trafficking: Implications for Transnational Sex Labour in Post-COVID-19 Era." Dalam *The Palgrave Handbook of (In)Security and Transnational Crime in the Global South*, hlm. 289–304.

Andini, Ovy Ghina, dan Alyafiah, Abdulloh. 2025. "Restitusi terhadap Anak sebagai Korban TPPO di Kota Samarinda." *Jurnal Hukum Lex Generis*, Vol. 5, No. 1: 1–17.

Bastian Nugroho, M. Roesli, 2017, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.2 No.1.

Chang, Callysta, dan Alshadad, Ahmad. 2025. "Evaluasi Perlindungan Korban Perdagangan Orang: Analisis Komparatif Indonesia-Filipina." *Jurnal Humaniora dan Riset Sosial*, Vol. 6, No. 1: 1–18.

Dadang Dadang, Hasan Alzagladi, Rio Hendra, 2023, *Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.1

Dadang, Hermawan, Alzagladi, Hibatul, dan Hendra, Rudi. 2023. "Pemberian Restitusi Korban Kasus TPPO dan Pemberantasannya." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1: 10–25.

Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, Hidayat Hidayat, 2024, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmiah, Vol.7 No.3.

Diwiryana, I Gusti Juli, dan Mirwansyah, Muhammad. 2025. "Analisis Hukum TPPO: Evaluasi Putusan dan Restitusi Korban." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2: 1–20.

Handayani, Nenden Nur. 2024. "Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Korban TPPO dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal HAM*, Vol. 15, No. 1: 58–75.

Handayani, Nita. "Efektivitas Pelaksanaan Restitusi bagi Korban TPPO dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal HAM*, Vol. 15 No. 1 (2024).

Harkristuti Harkrisnowo, "Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Perdagangan Orang", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 37 No. 3, 2007, hlm. 310.

- Hartanto, Wisnu Tri, dan Fatmawati, Nurul. 2025. "Pemberian Restitusi terhadap Korban TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 3, No. 1: 5–17.
- Hasanudin, Abdul. 2015. "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus TPPO dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 1: 113–120.
- Irawan, Arief, Leonard, Tigor, dan Rizal, Syarif. 2026. "Restorative Justice as a Form of Legal Protection for Children Involved in Legal Cases in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Proceedings of the International Forum on Psychology, Law, and Education*. Atlantis Press.
- Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto, 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai transnational crime*, *Ganesha Law Review*, Vol. 4 No.2.
- Louisa Yesami Krisnalita, 2017, *Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Wanita dan Anak menurut UU NO.21 Tahun 2007*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.6 No.2.
- Marasabessy, Fachri. 2016. "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1: 91–106.
- Marlina, dan Zuliah, Ayu. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Maryam, Siti, dan Prasetyo, Bimo. 2025. "Implementasi Restitusi bagi Korban TPPO." *Ranah Research: Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 4, No. 1: 1–13.

Masrina Yanggolo, Caecillia J.J Waha dan Dicky J. Paseki, 2024, “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4, hlm. 1.

Purbasari, Ika, dan Suryadi, Eko. 2023. “Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Korban TPPO di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1: 85–106.

Purbasari, Intan, & Suryadi, Eko. “Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Korban TPPO di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1 (2023).

Putri, Mutiara. 2019. “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.” *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 1: 36–45.

Ratna Yunita dan Rika Saraswati, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Mekanisme Restitusi*,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019, hlm. 345.

Resa, M. Kurniawan, dan Jaya, N. Satria Permana. 2021. “Problematisa Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3: 301–309.

Riskiyono, Warasman Marbun, & Hartanto. “*Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian*.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 (2024).

Rohman, Ahmad. “*Perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO melalui Restitusi dan Kompensasi.*” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2 (2022).

Sari, Dian Kusuma. “*Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana.*” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2022).

Syamsuddin, *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*, *Sosio Informa* Vol.6 No. 1, 2020, hlm. 23.

Yunita, Reni, dan Saraswati, Retno. 2019. “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Mekanisme Restitusi.*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3: 345–360.

Zainal Abidin. 2022. *Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Restitusi.* *Jurnal Yustisia*, Vol.19 No. 2.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb.

Pengadilan Negeri Cikarang. 2021. *Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr* tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Cikarang.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 2025. *Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk* tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tanjungkarang.

Pengadilan Negeri Sumber. 2025. *Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Sbr* tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sumber.

E. Internet dan lainnya

CEDAW Committee. 2020. *General Recommendation No. 38 on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration*. United Nations, CEDAW/C/GC/38.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

“Data Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2024.”

<https://www.kemenpppa.go.id>. (diakses 21 Oktober 2025).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023).

Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia. Diakses dari

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3756>

Komnas Perempuan. “Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024.” <https://www.komnasperempuan.go.id>. (diakses 19 Oktober 2025).

Kompas.com, “*Jarnas Anti-TPPO Catat Ada 248 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang 2024, 87 Anak Jadi Korban*”,

<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tpo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Panduan Permohonan Restitusi Bagi Korban TPPO.” <https://www.lpsk.go.id>. (diakses 20 Oktober 2025).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2023. *Laporan Tahunan Restitusi dan Kompensasi*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi oleh Korban Tindak Pidana*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/202113/perma-no-1-tahun-2022>

United Nations, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law* (2005); UNODC, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, 2000.

<https://www.unodc.org>. (diakses 18 Oktober 2025).

UNODC. 2021. *Toolkit for Mainstreaming Human Rights and Gender Equality into Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons*.

Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

